
TIM PENGELOLA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial atau *Jurnal Litbang Kessos* merupakan majalah ilmiah berkala bidang kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.

Jurnal Litbang Kessos memuat hasil-hasil penelitian dan pengembangan, serta pemikiran bidang kesejahteraan sosial.

Jurnal ini bertujuan memberikan informasi di bidang kesejahteraan sosial.

Pembina	:	Drs. Hadi Carito, M.Si
Penanggung Jawab	:	Dra. Sarmini
Ketua Dewan Editor	:	Dra. Indah Huruswati, M.Si
Editor Ahli	:	Prof. DR. Rusmin Tumanggor, MA Adi Fahrudin, Ph.D
Editor Pelaksana	:	Drs. Muchtar, M.Si Drs. Anwar Sitepu, MP Drs. Nurdin Widodo Drs. Setyo Sumarno Drs. Bambang Pudjianto, M.Si Drs. Gunawan
Sekretariat	:	Dini Khairunnisa, S.Kom Yanuar Farida Wismayanti, S.ST

Alamat Redaksi :

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
Telp. (021) 8017146, Fax. (021) 8017126
E-mail : puslitbangkessos@yahoo.co.id

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa mengubah makna tulisan. Tulisan yang dimuat akan diberikan imbalan. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan.

JURNAL

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

DAFTAR IS

PENGANTAR REDAKSI	i
KESIAPAN DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN Studi Kasus Kabupaten Halmahera dan Kota Manado <i>Sutaat dan Nurdin Widodo</i>	1 - 16
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETAHANAN SOSIAL PADA KOMUNITAS MULTIKULTUR Studi di Kelurahan Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado <i>Mochamad Syawie</i>	17 - 27
RELEVANSI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAERAH PERBATASAN Studi Kasus Miangas <i>Muchtar</i>	28 - 38
GENDER DAN KELUARGA MIGRAN DI INDONESIA <i>Togiaratua Nainggolan</i>	39 - 50
INTERAKSI SOSIAL KLIEN DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL Studi Pada PSTW Budi Dharma <i>Ruaida Murni</i>	51 - 60
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK YANG DIPERDAGANGKAN Studi Kasus di Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA) <i>Hari Harjanto Setiawan</i>	61 - 71
JAMINAN SOSIAL BERBASIS KOMUNITAS LOKAL Studi Kasus Perkumpulan Kematian Al-Khoiro Di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan <i>Habibullah</i>	72 - 81

PENGANTAR REDAKSI

Era reformasi yang telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun terakhir ini telah cukup banyak membawa perubahan, terutama perubahan kebijakan dan arah pembangunan, yaitu berupa pengurangan peran pemerintah pusat yang diimbangi dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan di daerah/wilayah masing-masing. Setiap Pemerintah Daerah dari tingkat kabupaten dan kota serta provinsi dituntut untuk mampu mengidentifikasi dan menganalisis keunggulan komparatif wilayah, berupa potensi/kekuatan berbagai sumber daya pembangunan (faktor internal) dan peluang/kesempatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan (faktor eksternal). Sutaat dan Nurdin mengangkat masalah ini terkait dengan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan fakir miskin. Berdasarkan hasil kajian mereka, tampaknya pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan kesiapan sumber daya, dianggap masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai instansi terkait dan tokoh masyarakat.

Beban otonomi daerah menuntut peran tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh adat, menjadi lebih besar, terhadap pembangunan di wilayahnya atau ketika wilayahnya menghadapi permasalahan sosial yang krusial, seperti kasus-kasus konflik akibat masalah pluralitas yang begitu kompleks. Seperti dikatakan oleh Moch. Syawie dari hasil kajiannya, tampaknya peran lembaga adat dan agama menunjukkan indikasi kuat sebagai peredam munculnya konflik pada suatu wilayah.

Peran tokoh masyarakat, menurut Muchtar, juga lebih dirasakan manfaatnya terutama di wilayah pulau terluar Indonesia yang saat ini banyak disorot media, yaitu Pulau Miangas. Muchtar mencoba mendeskripsi kehidupan masyarakatnya, dari potensi yang dimiliki, keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembangunan hingga program-program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Kajian ini tampaknya cukup menjawab kekhawatiran sebagian pihak baru-baru ini bahwa Filipina akan mengklaim kepemilikan Pulau Miangas.

Dari kajian Peneliti dalam Jurnal ini, tampaknya keeratan komunitas yang terlembaga dalam suatu wilayah sesungguhnya merupakan pelaksanaan yang nyata dari *good governance* karena ia menanganai problem-problem yang tidak dapat ditangani baik oleh para individu yang bertindak sendirian maupun oleh pemerintah. Ikatan-ikatan kekerabatan dan etnis (artinya solidaritas tradisional dan ikatan kultural) akan lebih menentukan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

REDAKSI